

Judul : Tidak ada aturan tegas, duh 554 ribu hektare sawah beralih fungsi
Tanggal : Minggu, 14 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tidak Ada Aturan Tegas Duh, 554 Ribu Hektare Sawah Beralih Fungsi

ANGGOTA Komisi II DPR Azis Subekti mendukung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memorandum atau penghentian izin terhadap Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Hal ini dilakukan untuk melindungi lahan sawah beralih fungsi menjadi industri dan lahan pemukiman.

"Kalaupun mau melepas LSD harus dilakukan secara teliti dan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah," saran Azis dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).

Menteri ATR/BPN Nusrin Wahid mengungkapkan sejak 2019 hingga 2025 telah terjadi alih fungsi lahan sawah seluas 554 ribu hektare menjadi kawasan permukiman dan industri. "Jadi sawah produktifnya hilang, sawah penggantinya pontang-panting dibuat belum menghasilkan sesuai yang diharapkan," ungkap Nusrin di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Palangka Raya, Kamis (11/12/2025).

Nusrin mengatakan, membuat sawah baru tidak ada artinya jika alih fungsi lahan terus meningkat. Padahal, Presiden Prabowo Subianto terus bersemangat untuk menciptakan sawah baru demi ketahanan pangan.

Azis melanjutkan, banyak kejadian LSD sudah beralih fungsi menjadi pondok pesantren (ponpes) atau sisa tanahnya tinggal sedikit yang dikelilingi oleh lingkungan pemukiman penduduk. Untuk itu, jangan sampai moratorium LSD ini malah menjadi lucu karena tidak diikuti dengan

kebijakan teknis yang detail di lapangan.

Azis mengajak masyarakat untuk melindungi lahan sawah mereka agar tidak beralih fungsi. Caranya, Pemerintah memberikan insentif yang menarik berupa pupuk dan bibit yang berkualitas dengan harga terjangkau kepada masyarakat yang masih mau menjaga lahan sawahnya.

Dia bilang, membuat lahan sawah menjadi produktif tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang. "Butuh lima kali panen atau percobaan. Tapi itu juga hasilnya belum tentu bagus," kata politikus Gerindra ini.

Namun demikian, Azis tidak setuju bila lahan sawah yang sudah beralih fungsi menjadi industri atau pemukiman digusur. Sebab tanah tersebut belum tentu subur lagi. Malahan bisa merusak investasi. "Yang perlu dilakukan adalah stop alih fungsi agar lahan industri dan pemukiman tidak semakin meluas," saran dia.

Anggota Komisi II DPR Mo-hamad Toha menambahkan, alih fungsi lahan sawah seluas 554 ribu hektare merupakan sinyal bahaya yang mengancam ketahanan pangan nasional dan keberlanjutan lingkungan. BPN harus memperkuat pengawasan dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah produktif.

"Jika ada pengembang atau perusahaan yang mengurus surat alih fungsi lahan sawah, harus langsung ditolak. Tidak ada alasan kompromi," tegas Toha dalam keterangannya, Jumat, (12/12/2025). ■ TIF